

**LEGITIMASI KEKUASAAN DALAM
PEMIKIRAN ABU HASAN AL MAWARDI**



TESIS

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Agama (M.Ag)

Disusun Oleh:

M Syaukani Ismar

NIM: 24205011017

**Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Syaukani Ismar
NIM : 24205011017
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Juli 2026



M. Syaukani Ismar.

NIM. 24205011017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Syaukani Ismar
NIM : 24205011017
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Juli 2026



M. Syaukani Ismar, S.Ag.
NIM. 24205011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1214/Un.02/DU/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : Legitimasi Kekuasaan Dalam Pemikiran Abu Hasan Al Mawardi

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M SYAUKANI ISMAR, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 24205011017
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mutiullah, S.Fil.I, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a695f38e2e3a



Penguji I

Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
SIGNED

Valid ID: 6a629985a40c8



Penguji II

Dr. H Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
SIGNED

Valid ID: 6a63158e0fda0



Yogyakarta, 15 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a6976b1c31da

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

LEGITIMASI KEKUASAAN DALAM PEMIKIRAN ABU HASAN AL MAWARDI

Yang ditulis oleh :

Nama : M. Syaikari Ismar, S. Ag.
NIM : 24205011017
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Magister Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Filsafat Islam

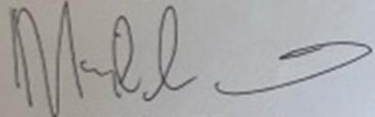
Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan ke Komisi Pembimbing dan Komisi Penjurian (M. Ag.).

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Juli 2026

Pembimbing,



Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum.
NIP: 19791213 200604 1 005

MOTTO

**“Hubungan baikmu dengan Allah merupakan faktor
terbesar kesuksesanmu”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Kepada umi tercinta, Sry Yusnaningsih, yang tidak pernah lelah mendoakan, memberikan motivasi, menasihati, serta senantiasa hadir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusan yang telah umi curahkan tanpa henti. Semoga setiap kebaikan yang umi berikan menjadi amal jariyah dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Swt.
Kepada almarhum aji, Ismail Umar, terima kasih atas keteladanan, ketabahan, dan nilai-nilai kehidupan yang telah diwariskan. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan menempatkan aji di surga-Nya
2. Kepada kakak-kakakku tercinta, Khatim dan Ainun, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, serta canda dan tawa yang selalu menguatkan selama proses penyusunan tesis ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan keberkahan dan kebahagiaan kepada kalian.
3. Kepada kakek tercinta, H. Mansur, dan nenek tercinta, Hj. Mu'jizah, terima kasih atas segala

dukungan, baik material maupun nonmaterial, serta doa yang tiada henti mengiringi setiap langkah dalam perjalanan studi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada kalian.

4. Untuk keluarga besar H Mansur Family, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kehangatan dalam setiap proses yang tidak mudah ini.
5. Untuk diriku sendiri, terima kasih telah bertahan, berjuang, dan memilih untuk tidak menyerah dalam setiap ujian kehidupan. Meski lelah berkali-kali datang menghampiri, engkau tetap melangkah hingga sampai di titik ini. Semoga setiap tetes lelah menjadi lillah, bernilai ibadah di sisi Allah Swt., dan menghadirkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.

Semoga karya ini menjadi langkah kecil yang bermakna, serta membawa manfaat yang lebih luas.

ABSTRAK

Persoalan mendasar dalam filsafat politik adalah bagaimana kekuasaan memperoleh legitimasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Al Mawardi menegaskan bahwa moralitas seorang pemimpin menentukan keabsahan dan keberlangsungan pemerintahan, karena pemimpin dipandang sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Adapun kajian mengenai pemikiran al Mawardi selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek fiqh siyasah, sistem pemerintahan, dan relevansinya terhadap demokrasi modern, sementara pembahasan mengenai struktur legitimasi kekuasaan sebagai fondasi moral kepemimpinan masih relative terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep etika politik al Mawardi, mengungkapkan bentuk-bentuk legitimasi kekuasaan dalam pemikirannya yang meliputi legitimasi agama, legitimasi etis, dan legitimasi sosiologis, serta menganalisa relevansinya terhadap praktik pemerintahan dan meritokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari karya-karya al Mawardi terutama *Al Ahkam Al Sultaniyah*, sedangkan data sekunder berasal dari buku, artikel ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Analisis dilakukan menggunakan teori etika politik Franz Magnis Suseno, khususnya mengenai kriteria legitimasi kekuasaan yang mencakup legitimasi sosiologis, legitimasi etis, dan legalitas yang dalam penelitian ini dipadankan dengan legitimasi agama dalam perspektif al Mawardi. Hasil penelitian menunjukkan keabsahan seorang pemimpin tidak cukup ditentukan oleh prosedur pengangkatan ataupun kekuatan politik melainkan, harus memenuhi tiga kriteria legitimasi. Legitimasi agama yang menjadikan syariat sebagai sumber utama keabsahan kekuasaan, legitimasi etis menuntut integritas moral, keadilan, amanah, dan tanggung jawab pemimpin kepada Allah dan masyarakat, serta legitimasi

sosiologis yang berangkat dari kebutuhan manusia untuk hidup bermasyarakat dan menerima otoritas demi tercapainya kemaslahatan bersama. Penelitian ini juga menemukan konsep legitimasi kekuasaan pada etika politik al Mawardi masih memiliki relevansi terhadap sistem pemerintahan Indonesia, terutama sebagai landasan etis dalam memperkuat demokrasi dan sistem meritokrasi yang menempatkan kompetensi, moralitas, dan tanggung jawab sebagai dasar utama dalam pengisian jabatan publik. Dengan demikian legitimasi kekuasaan al Mawardi tidak semata-mata bersifat formal tetapi merupakan pengakuan moral dan sosial.

Kata kunci: Etika Politik, al Mawardi, Legitimasi Kekuasaan, Meritokrasi.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Terutama kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Magister Agama (M.Ag) pada jurusan Magister Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga pada waktunya. Dengan Tesis berjudul : ***“Legitimasi Kekuasaan Dalam Pemikiran Abu Hasan Al Mawardi”***

Shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, yang telah membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dengan menyebarkan cahaya ke mana-mana. Sebagai lampu jalan dalam bayang-bayang dalam keberadaan manusia. Tentunya penulis tidak dapat menyelesaikan Tesis ini tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan tesis ini. Terrima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.

selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Muhammad Fatkhan, S.Ag., M.Hum. selaku ketua jurusan Magister Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Mutiullah, S.Fil.i., M.Hum. selaku dosen pembimbing tesis ini. Dengan segenap kemampuan, waktu, pikiran dan tenaga serta penuh keikhlasan dan kesabaran membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terutama dosen prodi Magister Aqidah dan Filsafat Islam yang telah banyak menyalurkan ilmu pengetahuannya.
6. Bapak Ismail Umar (alm) dan Ibu Sriyusnaningsih selaku orang tua penulis yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan, dan doa untuk menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Semoga Allah selalu membalas kebaikan umi dan aji. Ainun Mardiah dan Khatimatussa'adah selaku saudara kandung penulis yang telah memberikan dukungan secara terus menerus pada penulis.

7. Segenap keluarga besar Mansur Family terkhusus kakek dan nenek yang telah memberikan dukungan baik berupa material dan non material. Semoga Allah membalas semua kebbaikannya.
8. Teman-teman seperjuangan di program Magister Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 2024.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang dan ampunan-Nya kepada para insan yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam proses penulisan ttesis ini.



Yogyakarta, 3 Juli 2026

M. Syaukani Ismar, S.Ag.

NIM. 24205011017

Daftar Isi

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II: PERJALANAN INTELEKTUALITAS ABU HASAN AL-MAWARDI	26
A. Biorafi Al Mawardi.....	26
B. Karya-karya Intelektual al Mawardi	29
C. Pergulatan Masyarakat, Ekonomi, dan Politik Pada Masa al-Mawardi	30
D. Kedudukan Al Mawardi Dalam Sejarah Pemikiran Islam	39
E. Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Al Mawardi	43

**BAB III: DASAR DASAR LEGITIMASI
KEKUASAAN PADA ETIKA POLITIK ABU
HASAN AL MAWARDI..... 47**

- A. Landasan Al Mawardi: Akal dan Wahyu
Sebagai Sumber Utama..... 47
- B. Legitimasi kekuasaan dan Moralitas
Penguasa 57
 - 1. Dasar Dasar Legitimasi..... 57
 - 2. Dasar-dasar moralitas Penguasa 64
- C. Agama dan Negara Menurut Al Mawardi 71
 - 1. Definisi Negara Al Mawardi..... 71
 - 2. Relasi Agama dan Negara dalam
pandangan al Mawardi..... 73

**BAB IV: LEGITIMASI KEKUASAAN DALAM
ETIKA POLITIK AL MAWARDI..... 81**

- A. Legitimasi Kekuasaan Dalam Etika Politik Al
Mawardi..... 81
 - 1. Legitimasi Agama Dalam Etika Politik Al
Mawardi 81
 - 2. Legitimasi Etis Dalam Etika Politik Al
Mawardi 91
 - 3. Legitimasi Sosiologis Dalam Etika Politik
Al Mawardi 96
- B. Relevansi Pemikiran Al Mawardi Untuk
Demokrasi Indonesia 104
 - 1. Legitimasi Agama dan Etis Dalam
Pemerintahan Indonesia 104
 - 2. Meritokrasi Dalam Pemerintahan Indonesia
Melalui Perspektif Al Mawardi 108

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	114
Daftar Pustaka	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan mendasar dalam etika politik terlebih dalam sistem khilafah yaitu bagaimana kekuasaan dapat memperoleh keabsahan, bukan sekedar kemampuan untuk berkuasa secara fisik maupun formal. Di mana terdapat anggapan bahwa sistem khilafah memberikan kebenaran absolut kepada seorang pemimpin, sehingga keputusannya tidak memerlukan persetujuan dari rakyat.¹ salah satu pemikir klasik Islam yang mencoba merumuskan dasar etika politik dalam bernegara adalah Abu Hasan Al Mawardi (974-1058 M), dalam *magnum opus*nya *al Ahkam al Sultaniyyah* dan *Adab al Dunya wa al Din*, di mana ia menunjukkan bahwa persoalan politik tidak dapat dilepaskan dari persoalan kekuasaan dan moral, karena moralitas seorang pemimpin menentukan keabsahan dan keberlangsungan pemerintahan. Karena ia menganggap bahwa pemimpin merupakan pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup.² dalam arti lain pemimpin menanggung beban agama dan

¹ Wael Azmeh, "Misconceptions about the Caliphate in Islam," *Digest of Middle East Studies* 25, no. 2 (2016): h. 9.

² Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), h. 5.

beban moral oleh sebab itu, Al mawardi mencoba memberikan kriteria-kriteri bagaimana seseorang dapat menjadi pemimpin yang otomatis juga membicarakan bagaimana keabsahan (legitimasi) seseorang dalam menjadi khalifah/pemimpin.

Salah satu persoalan mendasar yang dibahas al Mawardi dalam sistem etika politiknya adalah bagaimana kekuasaan itu didapatkan, yaitu tentang dasar moral dan hukum yang menjadikan sebuah kekuasaan sah untuk diterima dan ditaati oleh rakyat. dalam perspektif legitimasi, kekuasaan tidak cukup didapatkan dengan kekuatan semata, melainkan harus dibangun diatas pondasi etika politik yang memiliki tiga kriteria utama yaitu: legitimasi agama, sosiologis dan etis.³

Legitimasi kekuasaan merupakan salah satu kajian penting dalam ilmu politik dan filsafat politik tekhusus lagi filsafat politik Islam karena membahas hubungan antara kekuasaan, moralitas, dan tanggungjawab pemimpin terhadap masyarakat. Persoalan filsafat politik muncul ketika kekuasaan dijalankan tanpa orientasi moral sehingga melahirkan ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang, serta pengabaian terhadap kemaslahatan umat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak cukup

³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 2024), h. 68.

hanya bersandar pada kekuatan atau pengakuan formal, melainkan harus dibangun melalui prinsip moral yang mengikat penguasa. Dalam tradisi pemikiran Islam, persoalan etika politik terkhususnya legitimasi kekuasaan memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan langsung dengan tujuan kepemimpinan sebagai penjaga agama dan pengatur kehidupan sosial. Oleh sebab itu, kajian mengenai etika politik menjadi penting dan relevan untuk menelaah bagaimana suatu kekuasaan memperoleh legitimasi yang tidak hanya sah secara politik, tetapi juga bernilai etis.

Kajian tentang pemikiran al Mawardi bukan merupakan hal baru dalam diskursus keislaman. Kajian tentangnya telah menjadi objek kajian serius keserjanaan Muslim, mayoritas literatur cenderung hanya berkutat pada dimensi praktis-implementasi dan relevansinya dengan sistem demokrasi modern. Misalnya saja dalam kurun lima tahun terakhir penelitian tentang al mawardi berkutat pada implelementasi *fiqh siyasah*-nya misalnya penelitian dari David Hanif (2022). Selanjutnya penelitian berfokus pada kontrak sosial misalnya saja yang dilakukan oleh Mohammad Nur wahyudi (2022), pendekatan tersebut cenderung memusatkan perhatian pada aspek prosedural kekuasaan, sehingga dimensi etika politik yang menjadi landasan legitimasi kekuasaan belum memperoleh

perhatian yang memadai.

Padahal, jika ditelaah secara mendalam, pemikiran al Mawardi tidak hanya mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga memuat prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar keabsahan seorang pemimpin dalam menggunakan kekuasaan serta alasan etis mengapa masyarakat berkewajiban memberikan kepatuhan kepadanya. Dari itu, pemikiran al Mawardi layak dibaca kembali tidak semata-mata sebagai teori politik normatif, melainkan sebagai suatu sistem etika dan filsafat politik yang menjelaskan hubungan antara moralitas, agama, dan legitimasi kekuasaan. Berangkat dari titik inilah penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisa secara komprehensif konsep legitimasi kekuasaan dalam pemikiran al Mawardi melalui perspektif etika politik terkhususnya legitimasi kekuasaan Franz Maginis Suseno, sehingga dapat memperlihatkan struktur etis yang mendasari konsepsi kekuasaan dalam tradisi politik Islam klasik.

Berangkat dari pemaparan diatas penelitian ini bermaksud melakukan pembacaan kembali terhadap pemikiran Al Mawardi yang terdapat pada kitab-kitabnya terkhususnya kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* dengan memfokuskan pada legitimasi kekuasaan. Sehingga masalah pokok yang diajukan adalah apa itu etika politik Al

Mawardi dan bagaimana legitimasi dalam pemikirannya sehingga seorang pemimpin dianggap sah dalam memimpin.⁴ Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap struktur etika politik yang mendasari pemikiran politik Al Mawardi, sekaligus menjawab pertanyaan dasar mengenai legitimasi kekuasaan yang berlandaskan agama, etis, dan sosiologis dan nanti pada akhirnya penelitian ini bisa menjadi salah satu acuan untuk menciptakan meritokrasi yang baik dalam bernegara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar legitimasi dalam pemikiran etika politik Abu Hasan Al-Mawardi?
2. Bagaimana legitimasi agama, etis, dan sosiologis pada pemikiran etika politik al Mawardi?
3. Bagaimana relevansi pemikirannya terhadap pemerintahan dan meritokrasi di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

⁴ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, Terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 25-26.

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan kegelisaan yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan itu tujuan penelitian adalah untuk memahami pemikiran etika politik terhususnya pada bagian legitimasi kekuasaan Abu Hasan Al-Mawardi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran etika politik al Mawardi dalam konteks praktik demokrasi di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi Islam, khususnya dalam bidang filsafat politik, etika politik, dan filsafat Islam. selain itu, kegunaan secara teoritis yaitu menjawab penelitian tentang legitimasi kekuasaan Abu Hasan al Mawardi dengan teori etika politik terkhususnya legitimasi kekuasaan. Penelitian ini menambah khasanah pengetahuan khususnya dalam filsafat politik Islam masa klasik. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa perspektif baru yang berlandaskan khazanah pemikiran filsafat politik Islam, khususnya pemikiran etika politik al Mawardi dalam menganalisis dan menawarkan landasann etis

bagi penyelesaian berbagai persoalan etika politik kontemporer. Adapun kegunaan secara praktis, menawarkan kerangka etika alternative untuk merespon fenomena pragmatism politik dengan menekankan kembali pentingnya politik berbasis prinsip moral bukan kepada kepentingan individu atau kelompok tertentu.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Al Mawardi telah banyak diteliti dan dikaji oleh para akademisi. Dalam berbagai literatur tersebut memiliki beragam fokus. Untuk mempertegas posisi penelitian ini, penulis mengklasifikasikan penelitian-penelitian terdahulu untuk menemukan *research gap* dan *novelty* (kebaruan) terlebih pada penelitian dalam kurun lima tahun terakhir yaitu:

Pertama, penelitian Jafar Ahmad (2025), “*Reactualizing Classical Islamic Power: Reinterpreting Al-Mawardi in Post-Reform Indonesia Democracy*” berfokus pada kekuasaan sebagai amanah dari ilahi dengan tujuan untuk keadilan dan kemaslahatan umum, sehingga pemikiran Al Mawardi dipandang sebagai salah satu cara untuk mengelola pemerintahan dalam konteks demokrasi

Indonesia pascareformasi.⁵ Hanya saja, artikel ini masih belum secara eksplisit menyebutkan bagaimana seorang pemimpin mendapatkan legitimasi dari rakyatnya.

Kedua, Muhammad Yasir (2024), “Konsep pemikiran politik al mawardi dalam pemilihan kepala negara”.⁶ Pada penelitian ini menganalisis pemikiran al mawardi melalui konsep *ahl al halli wa al aqdi* serta bagaimana konsep itu diterapkan dalam konteks ke Indonesiaan, dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep al mawardi memiliki kesamaan dan dapat diterapkan dengan sistem demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi berdasarkan UU No. 42 Tahun 2008.

Ketiga, Dwi Fa’yi Arya Sakhi dkk (2024), “Etika politik Islam dalam Masyarakat kontemporer: perspektif al mawardi”.⁷ berfokus pada pemahaman konsep etika politik al mawardi dan efisiensi administrasi yang diperkenalkan al mawardi dan masih relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer sehingga dapat diimplementasikan dalam konteks politik Islam saat ini, akan tetapi pada penelitian ini

⁵ Jafar Ahmad, “Reactualizing Classical Islamic Power: Reinterpreting Al-Mawardi in Post-Reform Indonesia Democracy,” 2025, <https://doi.org/10.24014/Jush.v33i1.36559>.

⁶ Muhammad Yasir, “PEMILIHAN KEPALA NEGARA DI INDONESIA” 2, no. 42 (2024): 29–42.

⁷ Dkk Dwi Fa’yi Arya Sakhi, “Etika Politik Islam Dalam Masyarakat Kontemporer :” 10, no. 2 (2024): 95–106.

al Mawardi dijadikan sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana perilaku politik pada masyarakat kontemporer.

Keenpat, Mauliana Magfirah (2023) “Al Mawardi’s Social Contract Theory (Study Of Al Mawardi’s Political Thought),” juga mengedepankan konteks pemerintahan Islam, dimana penguasa dan rakyat memiliki akad politik dengan menempatkan penguasa sebagai pemegang amanah dan rakyat sebagai pihak pemberi legitimasi sehingga menimbulkan dimensi kontrak sosial. Akan tetapi masih belum memberikan gambaran secara utuh mengapa rakyat harus mematuhi segala perintah pemimpin dan apa yang menyebabkan perjanjian itu terjadi.⁸

Kelima, penelitian David Hanif (2022) “Analisis Fiqh Siyasah tentang khilafah menurut al mawardi dalam kitab al-ahkam as shultaniyyah”.⁹ Dalam penelitian ini berfokus pada peran serta konsep khalifah sebagai pengganti Nabi dan menjelaskan bagaimana cara prosedural pengangkatan kepala negara sesuai dengan konsep *ahlul halli wa al aqdi*.

Keenam, Mohamad Nur Wahyudi, “Teori Kontrak

⁸ Mauliana Maghfiroh, “Al Mawardi’s Social Contract Theory (Study Of Al Mawardi’s Political Thought),” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 8, no. 2 (2023): 142–57.

⁹ David Hanif, “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al- Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah,” 2022, 153–66.

Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al Mawardi, Thomas Hobbes Dan John Lock” kajian ini lebih berfokus pada pemikiran sosial al mawardi dilihat dari perspektifkontrak sosial, selain itu menitik beratkan pada aspek politik, historis, dan komparasi dengan tokoh barat seperti Hobbes dan Locke.¹⁰

Ketujuh, Qamaruddin Khan, Kekuasaan Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara. Buku ini menjelaskan pemikiran al Mawardi bahwa al Mawardi merupakan peletak dasar ilmu politik di dunia Islam. dalam buku ini juga mengaskan kurang lebih selama empat ratus tahun muslim mengikutsertakan diri dalam penaklukan dan pembangunan kerajaan, namun selama itu mereka tidak bisa menyusun sebuah gagasan atau teoritentang negara yang konkret dan pola administrasi pemerintahan yang baik. Walaupun disini Qamaruddin Khan tidak menerima para peneliti al Mawardi yang melihatnya sebagai seorang filosof dalam bidang politik, karena ia menganggap al Mawardi lebih suka berbicara hal yang bersifat empiris dari

¹⁰ Mohamad Nur Wahyudi, “TEORI KONTRAK SOSIAL (STUDI KOMPARASI TEORI POLITIK MENURUT IMAM AL MAWARDI, THOMAS HOBBS DAN JOHN LOCK,” *An Nawa Jurnal Studi Islam* 04, no. 02 (2022): 113–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.504>.

pada hal yang bersifat spekulatif.¹¹

Kedelapan, Tesis yang ditulis Fathor Rohman dengan judul, *Relasi Agama Dan Negara Di Indonesia (Studi Pemikiran Al-Mawardi Dan Taqiyuddin An-Nabhani)*. Pada tesis ini berusaha untuk membandingkan pemikiran al Mawardi dan Nabhani. Al mawardi menganggap agama dan negara mempunyai satu kesatuan yang saling berkaitan. Sedangkan Nabhani menganngap bahwa negara harus berdasarkan syariat Islam termasuk kerangka dan prakteknya dalam bernegara. Kesimpulan dari tesis ini bahwa negara harus memiliki landasan agama, akan tetapi penelitian ini tidak memaparkan secara jelas bagaimana agama bekerja dalam sistem bernegara apakah hanya menjadi pandangan moral atau samapai menyentuh pada administrasi negara.¹²

Pada penelitian-penelitian di atas cenderung membaca Al Mawardi sebagai sebuah pemikiran prosedural dalam berpolitik seperti bagaimana mengatur negara, memilih pemimpin, serta bagaimana relevansinya dengan sistem politik modern, namun kurang menganalisis

¹¹ Qamaruddin Khan, *KEKUASAAN PENGKHIANATAN DAN OTORITAS AGAMA: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999).

¹² Fathor Rahman, "RELASI AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA (STUDI PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI)" (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA, 2019).

bagaimana sahnya seorang pemimpin jika dilihat dari kacamata etika politik terkhususnya dalam masalah legitimasi kekuasaan pemimpin dan bagaimana rakyat dapat menerima kekuasaan tersebut.

Selain itu juga, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya Belum banyak yang membahas secara spesifik pemikiran legitimasi Al Mawardi menggunakan kerangka etika politik terkhususnya legitimasi Franz Magniz Suseno untuk menguji validitas keabsahan penguasa. Sehingga, berdasarkan pemetaan terhadap beberapa literature di atas, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan (gap). Penelitian ini akan masuk kepada ranah filsafat moral dan politik untuk membuktikan bahwa struktur pemikiran al mawardi bukanlah pragmatism, melainkan sebuah sistem etika politik.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini untuk melihat dimensi legitimasi kekuasaan dari pemikiran Abu Hasan Al Mawardi, maka diperlukan sebuah teori dalam menganalisa pemikirannya, dalam hal ini teori etika politik dari Franz Magnis Suseno, terkhususnya pada bagian legitimasi dirasa cocok untuk melihat sisi tersebut.

1. Konsep tentang legitimasi kekuasaan

Legitimasi merupakan keadaan suatu kekuasaan, otoritas, atau pemerintahan yang diakui sebagai sah oleh pihak yang diperintah atau diatur. Sebuah kekuasaan atau sistem dianggap *legitim* jika diakui dan diterima oleh individu atau kelompok yang berada di bawahnya sebagai bentuk yang benar, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu, seperti hukum, tradisi, atau kesepakatan sosial. Legitimasi sendiri dapat diperoleh dengan berbagai cara misalnya saja persetujuan rakyat, kesepakatan sosial, atau bahkan kekuatan serta karisma individu yang dianggap layak memimpin. Tanpa adanya legitimasi kekuasaan atau otoritas cenderung rapuh karena tanpa dukungan dan penerimaan dari masyarakat, sistem tersebut akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan eksistensinya.¹³

Uriel Abulof mengategorikan legitimasi menjadi dua: legitimasi politik negatif (*negative political legitimacy*) dan legitimasi politik positif (*positive political legitimacy*). Legitimasi negatif menjawab pertanyaan apa yang sah dan berkenaan dengan kebijakan yang tepat, sedangkan legitimasi positif menjawab pertanyaan siapa yang mengesahkan dan berkenaan dengan aktor yang tepat. dalam legitimasi

¹³ Ikilil Pradigta, *Pengantar Filsafat Politik* (Yogyakarta: IRCiSod, 2025), h. 36-38.

negatif suatu otoritas dianggap sah bukan karena keunggulannya, tetapi karena dianggap sebagai pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan pilihan lain yang lebih buruk. Sementara itu, dalam legitimasi positif suatu otoritas dianggap sah karena keberadaan mereka dianggap baik oleh masyarakat karena berhasil menyediakan kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan stabilitas. Sehingga masyarakat mendukung otoritas karena merasa bahwa pemerintahan secara aktif memenuhi kebutuhan atau harapan mereka.¹⁴

Sebelum lebih jauh membahas tentang legitimasi Magnis Suseno, perlu kiranya membahas hubungan filsafat politik dengan ilmu politik. Di mana legitimasi kekuasaan dalam penelitian ini termasuk pada ranah etika politik yang merupakan bagian dari filsafat politik, maka perlu kiranya untuk membahas hubungan filsafat politik dan ilmu politik. Keduanya ini memiliki hubungan yang erat, tetapi berbeda dalam pendekatan, tujuan, dan fokus kajiannya. Meskipun keduanya mempelajari aspek-aspek politik, filsafat politik lebih bersifat normatif dan teoritis, sedangkan ilmu politik cenderung empiris dan analitis. Dari segi sifatnya, filsafat politik merenungkan dan mengevaluasi prinsip-

¹⁴ B. Herry Priyono, *Kebebasan, Keadilan, Dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About* (Jakarta: Kompas, 2022), h. 14.

prinsip dasar yang seharusnya mengatur kehidupan politik, seperti keadilan, kebebasan, dan kekuasaan, sedangkan ilmu politik lebih kepada studi ilmiah tentang perilaku politik, struktur, dan proses pemerintahan berdasarkan fakta dan data empiris.

Dari segi metode, filsafat politik menggunakan pendekatan reflektif dan normatif yang tidak terbatas pada fakta, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan idealism. Sedangkan ilmu politik menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis fenomena politik, seperti survei, studi kasus, dan analisis statistik.

Dalam masalah etika politik terkhususnya terkait legitimasi kekuasaan, masalah dasarnya adalah kekuasaan membutuhkan landasan etis sebagai legalitas agar bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Haryatmoko, bahwa memang saja kekuasaan diperoleh dengan kekerasan, kemudian hukum atau norma akan melegitimasi sesudahnya. Namun, kualitas legitimasi itu berpengaruh terhadap ketulusan dukungan warga negara. Kebutuhan akan legitimasi tindakan ini memberi peluang wacana normatif.¹⁵ Moral sebagai titik tolak filsafat politik menjadi penting karena akan menentuk

¹⁵ Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan* (Jakarta: Kompas, 2014). H. 1-2

nurani. Orang yang mampu memasuki dimensi moral dalam kehidupannya mudah menyesuaikan dengan etika politik dalam penyelenggaraan negara, sehingga dimensi moral ini merupakan dasar rasionalitas dalam berpolitik.¹⁶

Politik sebagai perwujudan dari kekuasaan dalam suatu pemerintahan Islam pelaksanaannya harus dilandasi dengan moralitas sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, agar manusia tidak tenggelam dalam gejala nafsu yang destruktif. Sehingga unsur paksaan dalam berpolitik tidak dapat disahkan karena untuk menjaga kepentingan bersama masyarakat dan negara secara keseluruhan. Maka, kekuasaan dalam etika politik terkhususnya Islam membutuhkan legitimasi moral selaras dengan nilai-nilai keagamaan yang ada, sebab secara umum agama merupakan sendi dasar kekuasaan yang paling kokoh yang mampu membangkitkan kepatuhan warga masyarakat dan negara secara sukarela.¹⁷ Dengan demikian etika politik pada dasarnya dapat disimpulkan sebagai landasan moral (etis) bagi pelaksanaan kekuasaan, karena dalam pelaksanaannya kekuasaan harus dipertanggungjawabkan, artinya kekuasaan semestinya mendapatkan legitimasi secara

¹⁶ Haryatmoko, H. 31.

¹⁷ A. Rahman Zaenuddin, *Kekuasaan Dan Negara* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), H. 94.

etis, tanpa adanya itu kekuasaan dianggap tidak sah karena tidak mempunyai legalitas dan kekuasaan akan digunakan untuk menindas. Meskipun begitu ada yang berpandangan bahwa landasan moral (etis) itu merupakan kebenaran yang harusnya bersumber dari wahyu (agama).

2. Konsep legitimasi kekuasaan pada etika politik Franz Magnis Suseno

Untuk melihat legitimasi kekuasaan dalam etika politik, dalam penelitian ini akan mengkhususkan teori yang telah dirumuskan oleh Franz Magnis Suseno. Dalam pemikirannya politik (etika politik) membutuhkan sebuah legitimasi kekuasaan agar pemerintahan yang dilakukan sah dan dapat diterima. Suseno berpendapat bahwa inti permasalahan etika politik adalah masalah legitimasi etis kekuasaan yang dapat dirumuskan dalam pertanyaan: dengan hak moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan mempergunakan kekuasaan yang mereka miliki?¹⁸ Seberapa besar kekuasaan seseorang ia tetap dituntut pertanggungjawaban. Apabila pertanggungjawaban itu tidak diberikan, kekuasaan itu tidak lagi dianggap sah. Penguasa dapat saja tidak memedulikan tuntutan etis dan

¹⁸ Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, H. 31.

percaya pada kemampuannya untuk menindas segala bentuk perlawanan. Tetapi tatanan masyarakat hanya berdasarkan intimidasi dari pihak yang memiliki daya pengancam, sudah tidak stabil lagi karena sudah tidak didukung oleh masyarakat. Oleh sebab itu penguasa tidak boleh menganggap enteng tuntutan legitimasi oleh masyarakat. Karena menurut Magnis manusia dalam berpolitik apabila dikaitkan dengan kekuasaan harus dilandasi dengan moral sehingga kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹ Hal itu sebagaimana pandangan al mawardi dan ibn Khaldun bahwa baik moralitas ataupun agama dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan kriterianya sebagaimana yang disebutkan Suseno, terbagi kedalam tiga bagian yang dapat digunakan untuk menilai keabsahan suatu wewenang atau kekuasaan. Pada prinsipnya, ada tiga kemungkinan kriteria legitimasi: Legitimasi sosiologis, legitimasi etis, dan legalitas.

Legitimasi sosiologis atau lebih tepatnya paham sosiologis tentang legitimasi, mempertanyakan mekanisme motivasi mana yang nyata-nyata membuat masyarakat mau menerima wewenang penguasa. Sejauh

¹⁹ Suseno, h. 61.

sosiologi membatasi diri pada penggambaran fungsi-fungsi yang terdapat dalam masyarakat, legitimasi sosiologis mengajukan pertanyaan apakah, dan karena motivasi manakah suatu tatanan kenegaraan nyata-nyata diterima dan disetujui oleh sebuah masyarakat.²⁰

Magnis Suseno menyebutkan ada tiga motivasi penerimaan kekuasaan klasik sebagaimana dirumuskan Max Weber: (1). Legitimasi tradisional yaitu keyakinan dalam suatu masyarakat bahwa pihak yang menurut tradisi lama memegang pemerintahan memang berhak untuk memerintah misalnya kaum bangsawan atau keluarga raja (dinasti), dan oleh karena itu pihak tersebut sudah sepatutnya ditaati. (2). Legitimasi karismatik, berdasarkan perasaan kagum, hormat, cinta atau masyarakat terhadap seorang pribadi yang sangat mengesankan sehingga mereka dengan sendirinya bersedia taat kepadanya. (3). Legitimasi rasional-legal, berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. Pihak yang memegang kekuasaan berdasarkan hukum dan menurut peraturan yang berlaku adalah penguasa yang sah.²¹

Selanjutnya legitimasi etis, pada legitimasi etis

²⁰ Suseno, h. 69.

²¹ Suseno, h. 69-72.

pemikiran magnis mempersoalkan keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi-segi moral. legitimasi ini menganalisis setiap tindakan negara dalam hal ini pemimpin dapat dipertanyakan dari segi-segi moral. penanyaan tersebut merupakan unsur penting dalam mengarahkan kekuasaan ke pemakaian kebijakan yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Terakhir yaitu legalitas, menurut Magnis, suatu tindakan adalah legal apabila dilakukan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Legalitas adalah kesesuaian dengan hukum yang berlaku, legalitas merupakan salah satu kemungkinan kriteria bagi keabsahan wewenang.²² Legalitas menuntut agar wewenang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Suatu tindakan adalah sah apabila sesuai dan tidak sah apabila tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Meski Magnis Suseno merumuskan tiga kriteria legitimasi sesuai yang disebutkan diatas, pada legalitas dalam kerangka Magnis Suseno yang merujuk pada hukum positive, dalam pemikiran al Mawardi berfungsi sebagai legitimasi agama karena syariat Islam adalah sumber hukum tertinggi sekaligus dasar keabsahan

²² Suseno, h. 70.

kekuasaan. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk memadankan arti dari legalitas dengan legitimasi agama yang berbasis syariat Islam. dengan demikian definisi di atas akan digunakan untuk menelusuri pemikiran-pemikiran al Mawardi, seperti pemikirannya tentang etika politik dan legitimasi yang melandasinya.

3. Dimensi Politis Manusia

Dalam kerangka dimensi-dimensi kesosialan manusia, dimensi politis mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan negara dan sistem-sistem nilai dan ideology-ideologi yang memberikan legitimasi kepadanya. Menurut Magnis dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan.²³ Jadi yang menjadi ciri khas suatu pendekatan disebut politis adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai dimensi dimana manusia menyadari diri sebagai anggota masyarakat sebagai keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya dan ditentukan kembali oleh tindak-

²³ Suseno, h. 17.

tanduknya.

Dimensi politis ini sendiri memiliki dua segi fundamental yang saling menguatkan satu dengan lainnya, sesuai dengan kemampuan fundamental manusia. Manusia adalah makhluk yang tahu dan mau, yang satu pihak memerlukan orientasi dan dilain pihak berdasarkan orientasi tersebut dapat mengambil tindakan.²⁴ Dua kemampuan fundamental manusia tersebut dapat diamati dalam semua bidang kehidupan manusia.

4. Pengoperasian Teori Legitimasi Franz Magnis Suseno

Berdasarkan definisi-definisi di atas teori etika politik khususnya legitimasi kekuasaan Franz Magnis Suseno dioperasikan dalam penelitian ini melalui langkah analisis pada bab IV, menggunakan tiga kriteria legitimasi yang telah dipaparkan yaitu: legitimasi sosiologis, etis, dan agama sebagai pisau analisis untuk membaca struktur dari pemikiran al Mawardi tentang legitimasi kekuasaan. Legitimasi sosiologis digunakan untuk menelusuri atas dasar apa penerimaan masyarakat terhadap otoritas pemimpin dalam pemikiran al Mawardi, legitimasi etis digunakan untuk

²⁴ Suseno, h. 17-18.

menguji tindakan dan kewenangan pemimpin agar dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sedangkan legitimasi agama sebagaimana telah dijelaskan di atas, berfungsi untuk melihat dominasi agama sebagai sumber tertinggi yang menjadi dasar keabsahan kekuasaan.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian jenis ini memiliki dua tujuan utama: *pertama*, menggambarkan dan mengungkapkan. *Kedua*, menggambarkan dan menjelaskan.²⁵ Adapun kepenulisan dalam penelitian ini berbasis kepustakaan (*library research*).²⁶ Umumnya, penelitian kepustakaan dilakukan melalui dua tahap, yaitu; *pertama*, pengumpulan data-data terkait dengan tema penelitian. *kedua*, tahap pengolahan data dengan menggunakan metode tertentu sesuai dengan teori penelitian.²⁷

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan metode dokumentasi terhadap data primer maupun data sekunder. Sumber primer berupa *magnum opus* Abu

²⁵ Suwarsito Hindayani Mustafidah, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2020), h. 50.

²⁶ Anton Bakkermdan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 63.

²⁷ Djaman Satori dan Aan Komariah, *metode penelitian kualitatif*, Alfabeta:bandung, 2014.

Hasan Al Mawardi, yaitu kitab *Al Ahkam Al Shulthaniyyah*. Di samping itu data primer juga didapatkan dari karya-karya lain dari Al Mawardi seperti, *Adab Dunya Wa Al Diin*. Adapun data sekunder didapatkan dari buku-buku, artikel, dan tulisan di web selama berkaitan dengan tema penelitian tesis ini. Pada nantinya data yang terkumpul diolah secara sistematis kemudian dianalisis secara kritis.²⁸

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu pertama-tama peneliti mendeskripsikan alur historis kehidupan Al Mawardi, latar belakang pemikirannya, serta mendeskripsikan data tentang pandangan legitimasi kekuasaan pada etika politiknya. Selanjutnya, melakukan analisis mendalam terhadap pandangan politik al Mawardi terkhususnya bagian legitimasi kekuasaan dengan teori etika politik Magnis Suseno. Pada bagian akhir menunjukkan kesimpulan dari rangkain deskripsi data dan analisis yaitu berupa peninjauan ulang baik berupa catatan terhadap data hingga merangkum hasil penelitian.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk menyajikan hasil penelitian secara terstruktur, logis, dan komprehensif, tesis ini akan disusun dalam lima bab dengan alur sebagai berikut :

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: pt renaka cipta, 2000), h. 134.

Bab I, Pendahuluan, akan memuat secara komprehensif seluruh rancangan penelitian, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, dan metode penelitian.

Bab II, akan dibahas tentang biografi kehidupan Al Mawardi. Kondisi politik yang terjadi pada zaman itu serta momen-momen penting dalam kehidupan al mawardi, sehingga dapat menemukan konstruksi dari pemikirannya. Dengan itu, bab ini berguna untuk melihat bagaimana pemikiran etika politik dari Al Mawardi.

Bab III, akan menguraikan pandangan al Mawardi tentang dasar-dasar etika politiknya

Bab IV, merupakan bab yang menjadi fokus pada tesis ini. Pada bagian ini akan memperjelas kedudukan pemikiran al mawardi dan dianalisis dengan etika politik Franz Magnis Suseno. Selain itu juga akan diuraikan implikasi serta relevansinya pada sistem politik kontemporer terkhusus pada sistem meritokrasi di Indonesia.

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan-pembahasan terdahulu serta saran-saran untuk kajian dan penelitian selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa legitimasi kekuasaan dalam pandangan al Mawardi dibangun di atas tiga elemen yang saling berkaitan. Elemen pertama adalah landasan epistemologis, yaitu sintesis antara akal dan wahyu yang tidak diposisikan secara dikotomis, melainkan saling melengkapi sebagai sumber kebaikan dan pijakan etika, baik dalam ranah keagamaan (adab syar'i) maupun ranah politik (adab siyasah). Elemen kedua adalah mekanisme kesepakatan sosial (kontrak sosial/bay'ah) antara pemimpin dan masyarakat, yang lahir dari kesadaran bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan saling membutuhkan, sehingga memerlukan otoritas yang mampu mencegah kezaliman dan menjaga ketertiban bersama. Elemen ketiga adalah syarat-syarat etis yang mengikat keabsahan kesepakatan tersebut, mencakup tujuh syarat bagi calon pemimpin, yakni adil, berilmu, sehat pancaindra, sehat fisik, memiliki wawasan kepemimpinan, memiliki keberanian, serta bernasab Quraisy, disertai syarat bagi kelompok pemilih, serta sepuluh kewajiban pokok yang harus dijalankan pemimpin setelah menjabat sebagai tolok

ukur keberlanjutan legitimasinya. Dengan demikian, dasar legitimasi dalam pemikiran al Mawardi bukan sekadar persoalan prosedur pengangkatan kekuasaan semata, melainkan sebuah kesatuan yang menautkan otoritas akal-wahyu sebagai basis nilai, kesepakatan sosial sebagai mekanisme pengakuan, dan pertanggungjawaban moral sebagai jaminan keabsahan yang berkelanjutan.

Adapun konstruksi legitimasi kekuasaan dalam pemikiran al Mawardi dibangun atas tiga pilar yaitu: legitimasi agama (teologis), yang menempatkan syariat sebagai sumber utama keabsahan kekuasaan di mana pemimpin berfungsi sebagai penerus kenabian yang terikat dengan hukum-hukum dari Tuhan. *Kedua*, legitimasi sosiologis, yang bersumber dari kesadaran bahwa manusia terlahir dalam keadaan lemah dan saling membutuhkan satu dengan lainnya, sehingga terjadinya kesepakatan sosial yang biasa disebut dengan kontrak sosial, pelaku kontrak sosial ini adalah pemimpin dengan masyarakat. *Ketiga*, pada legitimasi etis ini menuntut agar setiap tindakan pemimpin dapat dipertanggung jawabkan secara moral berdasarkan norma keadilan, sebagaimana termuat dalam tujuh syarat etis bagi calon pemimpin dan sepuluh pokok kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Selain syarat seorang pemimpin, syarat pemilihan juga harus diutamakan moral dahulu yaitu keadilan. *Ketiga*,

legitimasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan dimana agama menjadi sumber nilai, kesepakatan sosial atau biasa disebut kontrak sosial menjadi mekanisme pengakuan dan integritas moral menjadi ukuran keabsahan sebuah pemerintah terlebih seorang pemimpin.

Adapun relevansi etika politik al Mawardi bagi perpolitikan kontemporer Indonesia yaitu terletak pada prinsip meritokrasi yaitu keyakinan bahwa jabatan public harus diberikan kepada seseorang yang kompeten dan memiliki integritas moral tinggi, bukan kepada yang dekat dengan penguasa atau yang memiliki koneksi dengan elit penguasa. Sistem meritokrasi ini dihadapkan langsung dengan praktek nepotisme dan politik balas budi yang masih menjadi permasalahan serius di negeri ini. Dengan begitu, pemikiran etika politik al Mawardi relevan untuk menjadi landasan konseptual sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan Indonesia yang bermartabat, nerkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh rakyat.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan peneliti dalam tesis ini setidaknya memberikan gambaran tentang bagaimana legitimasi kekuasaan pada etika politik al Mawardi, serta

relevansinya dengan politik Indonesia kontemporer. meskipun demikian argument-argumen peneliti tentang gagasan legitimasi kekuasaan al Mawardi memiliki kemungkinan untuk salah, oleh sebab itu, perlu untuk dikaji ulang dalam penelitian-penelitian selanjutnya agar memunculkan pandangan al Mawardi secara menyeluruh dan utuh.

Peneliti juga menyadari bahwa penelitian ini masih belum cukup untuk mewakili pemikiran al Mawardi yang tersebar kedalam ratusan halaman pada kitab-kitabnya. Tidak menutup kemungkinan, dalam buku-buku al Mawardi yang tersebar tersebut dapat ditemukan hal-hal yang bisa saja berlawanan dengan isi dari tesis ini. Dengan begitu, kajian tentang pemikiran al Mawardi dalam bidang legitimasi kekuasaan pada etika politik serta filsafat politik masih sangat terbuka lebar untuk menghadirkan perspektif-perspektif baru dan dengan teori-teori yang lebih baru.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pustaka

- Abdul Qadim Zallum. *Pemikiran Politik Islam*. Bangil: Al Izzah, 2001.
- AGIL, SABANI, AULIA NAIYA, MAZAYA P NISRIINAA, and NIKEN M SAVINA. "Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia." *AKTIVISME: JURNAL ILMU PENDIDIKAN, POLITIK DAN SOSIAL INDONESIA* *Учпедумелу: Asosiasi Seni Desain Dan Komunikasi Visual Indonesia* 1, no. 3 (2024): 144–52.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.333>.
- Ahmad, Jafar. "Reactualizing Classical Islamic Power: Reinterpreting Al-Mawardi in Post-Reform Indonesia Democracy," 2025.
<https://doi.org/10.24014/Jush.v33i1.36559>.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, Terj. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- . *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.
- Alwie, Alfoe Niam. "Konstruksi Filsafat Sosial Al-Mawardi." *Kalam* 6, no. 2 (2012): 319–40.
- Amin, Syamsul Munir. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah, 2024.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (No Title). Jakarta: pt renaka cipta, 2000.
- Azmeh, Wayel. "Misconceptions about the Caliphate in Islam." *Digest of Middle East Studies* 25, no. 2 (2016): 227–63.
- Azyurmadi Azra. *Azyurmadi Azra, Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Dan Post Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Dagher, Yousef A. Dagher & Farid M. *Al Qurun Al Wusta, Tarikh Al Hadarat Al Am*. Beirut: Manshurat Uwaidat, 1965.

- Diana, Rashda. "Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam." *Tsaqafah* 13, no. 1 (2017): 157–76.
- Dwi Fa'yi Arya Sakhi, Dkk. "Etika Politik Islam Dalam Masyarakat Kontemporer : " 10, no. 2 (2024): 95–106.
- Franz Roshenthal. *Etika Keserjanaan Muslim: Dari Al Farabi Hingga Ibn Khaldun*. Bandung: Mizan, 1996.
- Fuad, Nur Mufid dan Nur. *Bedah Buku Al-Ahkam Sulthaniyah Al-Mawardi: Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abasiyah*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2000.
- Grunebaum, G.E. Von. *Classical Islamic A Hstory 600-1258*. London: George Allen And Unwin Ltd, 1970.
- Hallaq, Wael B. *Radical Separation of Power A History of Islamic Constitutionalism*. London: Oneworld Academic, 2026.
- Hanif, David. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al- Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah," n.d., 153–66.
- Hanna Mikhail. *Politics and Revelation: Mawardi and After*. Edinburgh: : Edinburgh University Press, 1995.
- Haryatmoko. *Etika Politik Dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas, 2014.
- Hidayani Mustafidah, Suwarsito. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2020.
- Iklil Pradigta. *Pengantar Filsafat Politik*. Yogyakarta: IRCiSod, 2025.
- Jiwa, Shainool. "The Baghdad Manifesto (402/1011): A Re-Examination of Fatimid-Abbasid Rivalry." *The Fatimid Caliphate: Diversity of Traditions*, 2018, 22–79.
- Khan, Qamaruddin. *KEKUASAAN PENGKHIANATAN DAN OTORITAS AGAMA: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Maghfiroh, Mauliana. "AL MAWARDI'S SOCIAL CONTRACT THEORY (STUDY OF AL MAWARDI'S POLITICAL THOUGHT)." *Journal*

- of Islamic Studies and Humanities* 8, no. 2 (2023): 142–57.
- Majid, Fakhry. *Etika Dalam Islam*, Terj. Zakiyuddin Baidhawiy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Mawardi, Abu Hasan Al. *Adab Ad-Dunya Wa Ad-Din*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1987.
- . *Al-Ahkam as-Sultaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* Terj. Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- . *Tashil Al Nazar Wa Ta'jil Al Zafaar*. Beirut: al Nahdah al Misriyah, 1981.
- Mawardi, Abu Hasan AL. *Adab Ad-Dunya Wa Ad-Din* Terj. Jamaluddin. Tangerang Selatan: Alifia Books, 2020.
- Miriam, Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moh. Mufid. *Politik Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press 2004, 2004.
- Muhammad Azhar. *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam Dan Barat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Munawir Sjadzali. *Islam and Govermental System*. Jakarta: INIS, 1991.
- Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safe'i. *Pengembangan Masyarakat Islam, Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*. Bandung: Rosda, 2001.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*. Jakarta: UI Press, 1958.
- Nata, Abudin. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001.
- Priyono, B. Herry. *Kebebasan, Keadilan, Dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*. Jakarta: Kompas, 2022.
- Rahman, Fathor. “RELASI AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA (STUDI PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI).” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

- JAKARTA, 2019.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- . *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Subkhi, Taj Ad- Din Abi Nashir Abdul Wahab bin Ali Bin Abdi Al- Ali Al- Kafi As. *Thabaqat As Syafiiyah Al Kubra*. Mesir: Matbaah Isa Al-babi Al-halabi Wa Syirkahu, n.d.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2015.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 2024.
- Syuhud, A Fatih. *Islam Dan Politik: Sistem Khilafah Dan Realitas Dunia Islam*. Malang: Pustaka al Khairot, 2019.
- Wahyudi, Mohamad Nur. “TEORI KONTRAK SOSIAL (STUDI KOMPARASI TEORI POLITIK MENURUT IMAM AI MAWARDI, THOMAS HOBBS DAN JOHN LOCK.” *An Nawa Jurnal Studi Islam* 04, no. 02 (2022): 113–25.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.504>.
- Watt, W. Montgomery. *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*. (Terj. Hamid Fahmi & Taufik Ibn Hisham). Jakarta: Bina Cipta, 1987.
- Yasir, Muhammad. “PEMILIHAN KEPALA NEGARA DI INDONESIA” 2, no. 42 (2024): 29–42.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Zaenuddin, A. Rahman. *Kekuasaan Dan Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Zubair, Anton Bakkermdan Ahmad Charis. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.